KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 dan dapat menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat atas penggunaan APBN yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat periode Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama Tahun 2020 merupakan laporan atas pencapaian target sasaran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disusun dan ditandatangani pada awal Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini dengan mempedomani kebijakan umum yang dilakukan pemerintah khusunya Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian terkait sebagai penyajian laporan atas capaian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Tujuan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 adalah :

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
2. sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atas pencapaian maupun kegagalan dari target kinerja yang telah ditetapkan;
3. sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pemangku Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas keberhasilan dalam pencapaian Kinerja yang memberikan konstribusi positif dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi

Barat Tahun 2020.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini dapat menyajikan informasi yang terukur dan akurat kepada pemberi mandat secara khusus maupun kepada masyarakat secara umum, dan juga dapat dijadikan tolok ukur dalam pencapaian kinerja pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

Mamuju, 18 januari 2021
Kepala Kantor Wilayah

H. M. Anwar N.
NIP. 19630702 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata pengantar	……..	1
BAB. I	……..	4
Pendahuluan	……..	4
BAB. II	……..	16
A. Perencanaan Kinerja	……..	16
B. Target Kinerja	……..	19
C. Penetapan Kinerja	……..	25
BAB. III	……..	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	……..	33
B. Realisasi dan Kinerja Anggaran	……..	92
BAB.IV	……..	95
Penutup	……..	95
Lampiran-Lampiran	……..	102

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan, baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangungan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu institusi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan serta dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaaan penegakan hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan HAM serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai instansi yang menyelenggarakan sebagian fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tingkat wilayah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor : 30 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Secara organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :

1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Divisi Administrasi
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan
4. Kepala Divisi Keimigrasian
5. Kepala Divisi Pelayanan Hukum
6. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subbagian/kepala subbidang.

7. Staf/Pelaksana
8. Fungsional (Perancang PerUUan, Penyuluh Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan)
9. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

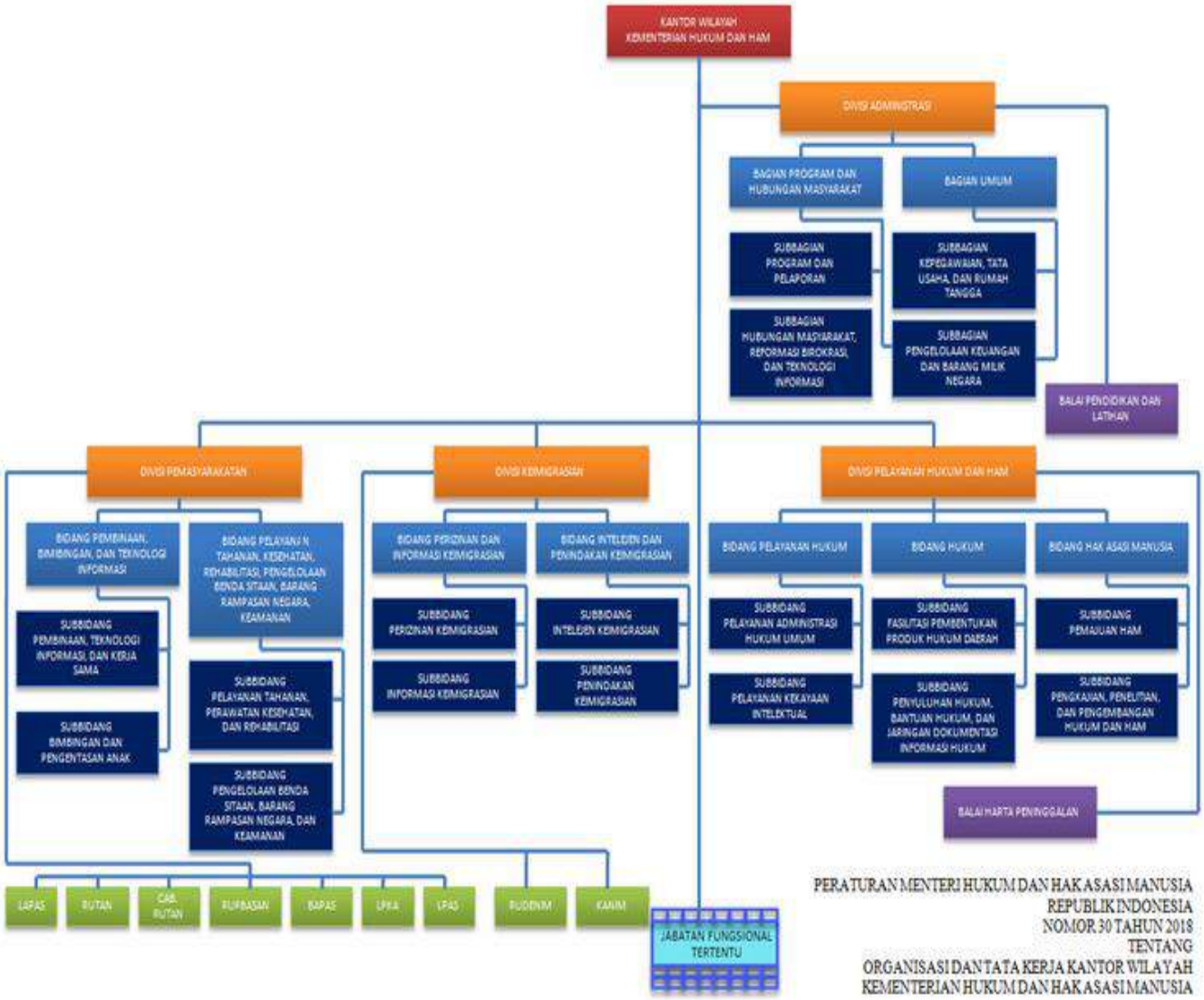

Daftar Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Sulawesi Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Unit Pelaksana Teknis Dan Wilayah Kerja

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
3	Kantor Imigrasi Kelas II Polewali	Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa
4	Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara
5	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa	Kabupaten Mamasa
6	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene	Kabupaten Majene
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju	Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu	Kabupaten Mamuju Utara
10	Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali	Provinsi Sulawesi Barat
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang Kepala Kantor Wilayah bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Divisi serta melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan para Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi masing-masing antara lain:

1. Divisi Admnistrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan

Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, serta menyelenggarakan fungsi :

1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
3) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protocol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;
6) Pengoordinasian pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Divisi Administrasi dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian terdiri atas:

a. Bagian Program dan Humas, yang terdiri 2 (dua) Sub.Bagian;
   a) Sub Bagian Humas, RB dan TI
   b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan
b. Bagian Umum.
   a) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
   b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Divisi Pemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Barat, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan rampasan Negara serta keamanan dan

ketertiban;

2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan rampasan Negara serta keamanan dan ketertiban;
3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Divisi Pemasyarakatan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang terdiri atas:

a. Bidang Pembinaan, Bimbingandan Teknologi Informasi, yang terdiri dari :
   a) Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama;
   b) Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.
b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, yang terdiri dari :
   a) Sub Bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi; dan
   b) Sub Bidang pengelolaan benda sitaan, barang rampasan Negara dan Keamanan.

3. Divisi Keimigrasiaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Sulawesi Barat, serta menyelenggarakan fungsi ;

1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan

teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan Keimigrasian;

2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan Keimigrasian;
3) Penyusunan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Divisi Keimigrasian dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang terdiri atas:

a. Bidang Perizinan dan informasi Keimigrasian, yang terdiri dari :
   a) Sub Bidang Perizinan Keimigrasian; dan
   b) Sub Bidang Informasi Keimigrasian.
b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang terdiri dari :
   a) Sub Bidang Intelijen Keimigrasian; dan
   b) Sub Bidang Penindakan Keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan terkait di wilayah Sulawesi Barat, serta menyelenggarakan fungsi ;

1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah, pengoordinasian, pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan

dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah, pengoordinasian, pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang terdiri atas:

a. Bidang Pelayanan Hukum, yang terdiri dari;
   a) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan
   b) Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
b. Bidang Hukum, yang terdiri dari :
   a) Sub Bidang pembentukan produk hukum daerah; dan
   b) Sub Bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum dan jaringan dokumentasi informasi hukum.

c. Bidang Hak Asasi Manusia.

a) Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan

b) Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Ham Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawei Barat pada tatanan kerangka akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni :

1. Penerapan protokol kesehatan 3M, berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona virus disease* 2019
2. Peningkatan fasilitas layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melakukan rehabilitasi lahan aula, lahan parkir, pagar dan pengadaan sarana penunjang kinerja layanan.
3. Faktor anggaran merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kinerja organisasi dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja.
4. Faktor Integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi Penegak Hukum dan Instansi terkait serta Organisasi Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
5. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur Hukum dan HAM diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum Kualitas dan kuantitas SDM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat baik di bidang hukum, penyuluh hukum, Penyidik PPNS dan aparatur hukum lainnya maupun SDM di bidang Administrasi, Pemasyarakatan dan Keimigrasian masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka menunjang Program Pemerintah Daerah Sulawesi Barat menuju daerah pertanian, pertambangan, dan hasil laut, maka peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terutama pelayanan hukum, kewarganegaraan, perseroan terbatas, pengawasan notaris dan pelayanan Keimigrasian diperlukan adanya alokasi anggaran yang mamadai sesuai dengan volume kinerja Kantor Wilayah, sehingga program-program Kementerian Hukum dan HAM R.I di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dapat terlaksana dengan baik.

Meskipun dalam keadaan pandemic yang membatasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020 cukup menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2020.

Pada prinsipnya Lingkungan Strategik yang berpengaruh khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat dibagi atas 2 (dua) Faktor strategik, yaitu :

1. Faktor Strategis Internal

   Sesuai dengan situasi dan kondisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat dikemukakan beberapa faktor Strategik Internal yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain :

   a. Sumber Daya Manusia

      Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebanyak 103 orang yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIa	1	0,97
Eselon IIb	4	3,88
Eselon III	9	8,74
Eselon IV	18	17,47
JFT	17	16,50
JFU	54	52,42
Jumlah	103	

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, akuntansi, manajemen, tehnologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, pembimbing kemasyarakatan, pengadaan barang/ jasa yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/ workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM), serta implementasi Corporate University, sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

Pada masa kondisi pandemi SDM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan tugas dan fungsi dengan system WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*)

Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah :

- jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).
- alokasi pegawai pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis masih belum terpenuhi secara maksimal sehingga dituntut untuk rangkap tugas dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap satker dalam pencapaian kinerja

b. Sarana dan Prasarana

- Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terletak di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju yang menempati areal tanah seluas 4.870 m^2 dengan luas bangunan 2.776 m^2, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja
- Penyediaan sarana informasi dan jaringan internet sangat

mendukung pelaksanaan capaian kinerja dengan masa pandemic pada tahun 2020 yang beberapa kegiatan menggunakan media virtual/ daring dan pelayanan online

c. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

d. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kepemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, pastisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

Terkait dengan komitmen ini pula, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dalam mendukung pencapaian kinerja, tahun 2020 Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM telah diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2. Faktor Strategik Eksternal

Sesuai dengan situasi dan kondisi Sulawesi Barat dapat dikemukakan beberapa faktor strategik eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah, antara lain :

a. Kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Berdasarkan *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris melalui lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang unsur Notaris, dengan komposisi unsur Pemerintah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Barat dan Kepala Biro Hukum Propinsi Sulawesi Barat .

b. Keterlibatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Proses Legislasi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Perancang Peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan Ranperda sangat menentukan. Dengan ditetapkannya keterlibatan perancang pada setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) menjadi sangat strategis. Kebutuhan akan Perancang Peraturan

Perundang-undangan semakin penting untuk menghindari permasalahan umum yang biasa terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan;

c. **Keterlibatan jajaran keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (khususnya di Sulawesi Barat) serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.**

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Sulawesi Barat yang terdiri dari Badan atau Insntansi Pemerintah di wilayah Jawa Tengah yang terkait dalam pengawasan orang asing melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di Propinsi Sulawesi Barat;

d. **Keterlibatan sebagai penanggung jawab pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah (Sulawesi Barat)**

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (*orang miskin*), pemberi bantuan hukum (*organisasi bantuan hukum*) serta penyelenggara bantuan hukum (*Kementerian Hukum dan HAM RI*). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan ***tanggung jawab negara*** dalam mewujudkan *equality before the law* (asas persamaan hak), *access to justice* (kebutuhan akses kepada keadilan), dan *fair trial* (kepastian hukum yang adil)

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) secara Cuma-cuma kepada

penerima bankum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi;

e. **Keterlibatan Tenaga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk peningkatan Kesadaran Hukum Masayarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, yakni Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Penjabaran pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2005 – 2025) sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, secara periodisasi yang berkelanjutan ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan mulai tahun 2005 – 2009 ; tahun 2010 – 2014; tahun 2015 – 2019; dan tahun 2020 – 2024.

Hal lain terkait dengan program Pemerintah saat ini, bahwa Presiden Joko Widodo dalam kabinet kerjanya telah menyusun program-program yang akan mendukung pemerintahannya (2020-2024). Visi Presiden RI 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya dalam mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Presiden RI juga menetapkan 5 arahan utama yang ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 (Indonesia maju), yaitu :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan, kerjasama industry dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Dan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Mengacu kepada hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM R.I telah menyusun Renstra tahun 2020 Tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran visi Presiden yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’.”

Selain visi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga

menetapkan 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM RI :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang Hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan Hukum dibidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terroercaya.
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran Hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Invatif, dengan makna sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam kontek tata nilai ini, professional dimaknai aparat Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi integritras dan etika profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permaslahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah mengembangkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan Institusi terkait.

- **Transparan**, adalah Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentangpenyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang diapai.
- **Inovatif**, adalah seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus mampu inovatif sehingga mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. TARGET KINERJA

Indikator kinerja Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai penjabaran Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM R.I 2020-2024 diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing yang secara umum dapat disampaikan sebagi berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM ;

Sasaran Program :

Meningkatnya dukungan Layanan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja

- ✓ *Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Hukum*

dan HAM

- ✓ *Nilai Reformasi Birokrasi*
- ✓ *Nilaia Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Indikator Output Program :

Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Sasaran program :

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Indikator Kinerja :

- ✓ *Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan*
- ✓ *Meningkatnya produktivitas narapidana/anak dan klien Pemasyarakatan menuju manusia mandiri*
- ✓ *Meningkatnya ketaatan Hukum mantan Narapidana/anak dan klien Pemasyarakatan*

Indikator Output Program :

- ✓ *Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar*
- ✓ *Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar*
- ✓ *Persentase narapidana/tahanan/anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar*
- ✓ *Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar*
- ✓ *Persentase gangguan kemanan yang ditidak dan ditanggulangi sesuai standar*
- ✓ *Persentase klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar*
- ✓ *Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar*
- ✓ *Persentase narapidana/anak dan klien Pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas*
- ✓ *Menurunnya persentase residivis*

Program Peningkatan Pelayanan dan Hukum Keimigrasian

Sasaran Program :

- ✓ *Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian*
- ✓ *Meningkatnya penegakan Hukum Keimigrasian*

Indikator Kinerja :

- ✓ *Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian*
- ✓ *Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian*

Indikator output program :

- ✓ *Jumlah pelayanan kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan*
- ✓ *Jumlah layanan internal eselon I*
- ✓ *Jumlah kegiatan penegakan Hukum Keimigrasian yang dilaksanakan*

Program Administrasi Hukum Umum

Outcome :

- ✓ *Terwujudnya Pelayanan Publik di bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepestian Hukum*
- ✓ *Terwujudnya otoritas pusat yang efektif dan tepat sasaran*

Indikator Kinerja :

- ✓ *Persentase penyelesaian administrasi hukum umum yang berkepastian Hukum*
- ✓ *Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindak lanjuti*

Indikator output program :

- ✓ *Jumlah penyelesaian permohonan layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum*
- ✓ *Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindak lanjuti*

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran program :

Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia

Indikator Kinerja :

- ✓ *Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual*
- ✓ *Persentase peningkatan produk KI yang dilindungi*
- ✓ *Penurunan pengaduan pelanggaran Kekayaan intelektual*

Indikator output program :

- ✓ *Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- ✓ *Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat*
- ✓ *Indeks kepuasan masyarakat*
- ✓ *Kepuasaan pegawai terhadap layanan internal*

Program Pembentukan Hukum

Sasaran program:

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas

Indikator Kinerja :

- ✓ *Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaiakn sesuai dengan perencanaan*
- ✓ *Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan*
- ✓ *Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaiakan sesuai dengan permhonan*

Indikator output program :

- ✓ *Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaiakn sesuai dengan perencanaan*
- ✓ *Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan*
- ✓ *Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaiakan sesuai dengan permhonan*

Program Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran program :

Terwujudnya Pembinaan Hukum

Indikator Kinerja :

- ✓ *Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan Hukum Nasional*
- ✓ *Jumlah RUU dalam PROLEGNAS Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan PERPRES yang sesuai dengan arah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional*
- ✓ *Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan Informasi hukum yang terintegrasi*
- ✓ *Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh Wilayah*
- ✓ *Jumlah orang/kelompok Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum*

Indikator output program :

- ✓ *Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan Hukum Nasional*
- ✓ *Jumlah RUU dalam PROLEGNAS Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan PERPRES yang sesuai dengan arah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional*
- ✓ *Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan Informasi hukum yang terintegrasi*
- ✓ *Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh Wilayah*
- ✓ *Jumlah orang/kelompok Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum*
- ✓ *Layanan internal eselon I*

Program Pemajuan HAM

Outcome :

Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM

Indikator Kinerja :

- ✓ *Persentase institusi pusat yang melaksanakan aksi HAM sesuai*

kesepakatan aksi HAM

- ✓ *Persentase institusi daerah yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM*
- ✓ *Persentase kabupaten/kota peduli HAM*
- ✓ *Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*
- ✓ *Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM*
- ✓ *Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu secara non yudisial*
- ✓ *Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindak lanjuti*

Indikator output program :

- ✓ *Persentase institusi pusat yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM*
- ✓ *Persentase institusi daerah yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM*
- ✓ *Persentase kabupaten/kota peduli HAM*
- ✓ *Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*
- ✓ *Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM*
- ✓ *Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu secara non yudisial*
- ✓ *Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindak lanjuti*

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Outcome :

Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset

Indikator Kinerja

- ✓ *Persentase Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang*

dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Indikator output program :

- ✓ *Persentase Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan HAM*

C. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan sasaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengacu kepada arah kebijakan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi.

Pada Tahun 2020 ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menetapkan Penetapan Kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	7.1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukukm dan HAM Sulawesi Barat	85

No	Kegiatan	Anggaran
1	pengelolaan administrative dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	13.467.043.000
Jumlah		**13.467.043.000**

Tabel : FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Eselon I : Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan di wilayah	7.0
2.	Meningkatnya produktivitas narapidana dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3.	Terwujudnya mantan Narapidana/anak yang taat Hukum	Menurunnya persentase residivis di Wilayah	1%
4.	Terwujudnya pemenuhan Hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah	55%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah	752.790.000
Jumlah		**752.790.000**

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	7.3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	2%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.463.237.000
Jumlah		**1.463.237.000**

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I
2. Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I
3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I
4. Ditjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM R.I

Unit Eselon II : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	80%
2	Terselenggaranya pelayanan Kekeayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	10 Jumlah Permohonan

	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2 Lokus
3	Terfasilitasinya rancangan produk Hukum didaerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	23 Raperda
4	Terselenggaranya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang
5	Terwujudnya penghormatan, perlindunga dan pemenuhan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah Daerah
		Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Sulawesi Barat	3 Rekomendasi
6	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	48 Orang
		Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Kantor Wilayah

		Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
7	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
8	Meningkatnya jumlaj PNBP AHU di wilayah	Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah	5%
9	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	1.984.000.000
2	Penyelenggaraan Kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	452.365.000

3	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan Hukum di wilayah	195.840.000
4	Penyelenggaraan Pemajuan HAM	224.790.000
5	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	856.324.000
6	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di wilayah	64.853.000
Jumlah		**3.778.172.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun 2020.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Provinsi wajib melaksankan seluruh kebijkan Menteri Hukum dan HAM selaku perpanjangan tangan di Wilayah Provinsi. Sebagai pelaksana kebijakan di wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam mendukung program dan pelaksanaan anggaran melaksanakan penyusunanan laporan akuntabilitas kinerja yang mnengacu kepada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil (outcome).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pencapaian sasaran kinerja sesuai program kerja dilaksanakan atas dasar penyusunan program dan rencana kinerja yang disusun sebelum pelaksanaan tugas Tahun Anggaran.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pedoman Restrukturisasi Program dan kegiatan sesuai

dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor : 0142/M.PPN/06/2009, dan SE.184/MK/2009 tangggal 19 Juni 2009, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyesuaian atas struktur anggaran yang telah ada. Program-program yang selama kurun waktu sampai dengan 2009 digunakan oleh beberapa Unit Eselon I telah dilakukan penyempurnaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan tersebut satu unit eselon I hanya bertanggung jawab atas satu program saja.

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	7.1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukukm dan HAM Sulawesi Barat	85

No	Kegiatan	Anggaran
1	pengelolaan administrative dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	13.467.043.000
Jumlah		**13.467.043.000**

DIVISI ADMINISTRASI

Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian dan Hukum dan HAM RI

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis Fasilitatif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Terdapat beberapa Indikator pengukur dalam penilaian kepuasan layanan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, anatara lain sebagai berikut :

- Layanan Keprotokoleran
- Publikasi/Pemberitaan melalui Media Cetak, Website dan Media Sosial
- Pembinaan Reformasi Birokrasi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- Pelayanan administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
- Pelayanan Uang Persediaan (UP)
- Pengelolaan BMN
- Pelayanan Kepegawaian
- Layanan Rumah Tangga
- Layanan Tata Usaha
- Transparansi Layanan
- Kompetensi Petugas dalam memberikan Layanan
- Integritas Petugas dalam memberikan Layanan
- Layanan Pengaduan
- Sarana dan Prasarana

Survei dilakukan dengan mengikuti survey PMPI menindak lanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ.OT.02.02-03 Tanggal 21 September 2020 perihal pemberitahuan pelaksanaan penilaian mandiri persepsi integritas (PMPI). Waktu pelaksanaan survey dilaksanakan \dari tanggal 28 september 2020 sd 24 Oktober 2020. Surveyor berasal dari pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.1

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	71	9.3	130.98

Berdasarkan survey yang dilaksanakan selama periode 28 september 2020 s.d. 24 oktober 2020 hasil skor yang diperoleh dari 119 responden tersebut adalah **9.3**. Responden pemberi nilai ini adalah berdasarkan responden penerima layanan yang diberikan oleh Divisi Administrasi.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{9.3}}{\mathbf{7.1}} \times 100\% = \mathbf{130.98}$$

Tabel 3.2

Perbandingan capaian indeks layanan Internal Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian (%)**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7.1	7.1	8.8	9.3	123.24	130.98

Analisis:

Dari skor survey yang diperoleh pada tahun 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap kepuasan dari pemberian layanan internal yang dilaksanakan Divisi Administrasi, terdapat peningkatan sebesar 6.28%. Hal ini

merupakan keberhaslian, selain melebihi target perjanjian kinerja juga melampaui capaian pada tahun 2019.

Peningkatan indeks kepuasan layanan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dikarenakan adanya komitmen dari seluruh jajaran pemberian layanan, dalam hal ini Divisi Administrasi, baik unsur pimpinan sampai dengan pelaksana. Dalam melaksakan Layanan, pemberi layanan berkomitmen dalam memberikan Layanan Prima, selain itu pemberi layanan mempercepat proses layanan dengan melakukan sosialisasi kepada penerima layanan, dalam Hal ini kepada Divisi Teknis dan para Pegawai.

Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Dalam penilaian Implementasi Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdapat indikator yang menjadi penilaian Reformasi Birokrasi antara lain :

- Faktor Pengungkit, terdiri dari 6 area perubahan, antara lain :
- ✓ Manajemen Perubahan
- ✓ Penataan Tata Laksana
- ✓ Penataan sistem manajemen SDM
- ✓ Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- ✓ Penguatan Pengawasan
- ✓ Penguatan kualitas Pelayanan Publik
- Faktor Hasil, terdiri dari 2 area perubahan, antara lain :
- ✓ Nilai Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat
- ✓ Peningkatan Kualitas pelayanan publik

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Nilai Reformasi Birokrasi	85	81.06	95.36%

Berdasarkan penilaian dari Tim Panel TPI Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukm dan Sulawesi Barat mendapatkan nilai **81.06**, yang mana nilai ini tidak mencapai target yang ditentukan yaitu **85**

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{81.06}}{\mathbf{70}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{95.36}$$

Tabel 3.4

Perbandingan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dan 2018

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2018**	**2019**
Nilai Reformasi Birokrasi	70	85	91.36	81.06	130.51%	95.36%

Analisis:

Pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kemenmterian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 dianggap belum optimal, hal ini ditunjukkan melalui hasil dari penilaian Tim Panel TPI Kementerian Hukum dan HAM. Dimana, berdasrakan hasil penilaian tersebut terdapat penurunan sebesar **26.31%** dari pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Hal ini dikarenakan menurunnya kualitas layanan yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 selain itu juga kualitas layanan secara umum turun dikarenakan adanya rehabilitasi gedung, pagar dan halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang menyebabkan menurunnya kenyamanan penerima layanan.

Namun secara umum, nilai yang dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ini, sudah cukup memuaskan, dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berhasil lolos tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sampai dengan tahapan TPN, hal ini dikarenakan adanya inovasi layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yaitu :

1. Divisi Adminsitrasi.
   - ✓ Inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi adalah SMS Gate away SIMPEG yaitu sebuah Sistem yang mana akan memberikan peringatan kepada pegawai berupa Chat WA apabila pegawai yang bersangkutan tidak absen ataupun tidak mengisi jurnal harian pada aplikasi SIMPEG
   - ✓ Aplikasi SIREN, yaitu layanan perencanaan dan penganggaran berbasis website yang memudahkan dalam proses pengusulan Anggaran dan perencanaan lainnya
   - ✓ Aplikasi SIGiat Sulbar, yaitu aplikasi yang menampilkan seluruh jadwal kegiatan dan pencapaian kegiatan tersebut, sehingga memudahkan Pimpinan maupun pelaksana dalam mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Divisi Pemasyarakatan
   - ✓ Inovasi Layanan yang dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan adalah bypass waktu pemeriksaan dan persetujuan berkas usulan PB,CB dan Remisi secara online yang menurut Permenkumham nomor 3 Tahun 2018 adalah 2 hari layanan menjadi 1 hari layanan
3. Divisi Imigrasi
   - ✓ Inovasi Layanan yang dilaksanakan oleh Divisi Imigrasi adalah Aplikasi Laporan Elektronik Bersama. Aplikasi berfungsi sebagai data base Warga Negara Asing yang Off Stay di wilayah Sulawesi Barat. Dengan aplikasi ini mempermudah dalam mengidentifikasi Warga Negara Asing yang telah Off Stay
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
   - ✓ SilakNot, yaitu aplikasi berbasis Website yang memudahkan dalam

pelaksanaan pelaporan Notaris dan sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Sulawesi Barat. Selain itu, melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah dapat melihat profil Notaris yang ada di Sulawesi Barat.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintahuntuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Evaluasi pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan stiap akhir tahun dengan indikator penilaian adalah pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang kedalam perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disepakati pada awal Tahun 2020. Adapun penilaian Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Wilayah adalah penilaian capaian akuntabiltas Divisi pelaksana yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berbanding dengan penyerapan Anggaran pada Kantor Wilayah

Hasil dari capaian Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di ukur berdasarkan pencapaian Perjanjian Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Berdasarakan hasil pengukuran tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Niali capaian Indikator kinerja utama (IKU)	100	94.71	96.15%

Capaian Indikator Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{25 Capaian Indikator Kinerja}}{\text{26 Indikator Kinerja}} \times 100\% = \mathbf{96.15\%}$$

Dari 26 Target Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020.

Akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja utam berbanding dengan realisasi/penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020

Tabel 3.6

Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

No	Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	Divisi Administrasi	14.149.206.000	14.054.423.312	99.33
2	Divisi Pemasyarakatan	752.790.000	717.978.637	95.38
3	Divisi Imigrasi	1.463.237.000	866.971.164	59.25
4	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	3.814.142.000	3.178.322.619	83.33
JUMLAH		**20.179.375.000**	**18.817.695.732**	**93.25**

Secara umum total Anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 20.179.375.000,- (dua puluh miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan pencapain Penyerapan Anggaran

sebesar Rp. 18.817.695.732,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), atau dengan persentase mencapai 93.25%.

Dengan melihat nilai pencapaian Kinerja dan capaian penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat maka diperoleh nilai pencapaian Akuntabilitas Kinerja sebagai Berikut

Akuntabilitas Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{96.15}}{\mathbf{93.25}} \times 100\% = \mathbf{103.11}$$

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 adalah **103.11**. pencapaian ini merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Rincian penilaian capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama tahun 2020 adalah sebagai berikut

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{103.11}}{\mathbf{85}} \times 100\% = \mathbf{121.30}$$

Tabel 3.7

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90	85	94.71	103.11	105.23 %	121.3%

Analisis:

Pencapaian nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Dengan persentase Efisiensi 21.3%.

Pencapaian nilai ini juga merupakan hasil dari Komitmen bersama unsur pimpinan beserta seluruh pegawai untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih baik dan bekerja dengan ikhlas. Dengan adanya komitmen bersama ini sebagian besar dari Target Kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 tercapai bahkan terdapat bebrapa capaian indikator Kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian Nilai Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki tren yang hamper sama, dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 pencapaian Akuntabiitas Kinerja yang teercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun di tahun 2020, hamper seluruh capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tercapai meskipun adanya pembatasan penggunaan Anggaran PNBP dan juga adanya Refocussing Anggaran pada Pagu rupiah murni (RM), yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan dan penyebaran virus Covid-19.

Tabel : FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Eselon I : Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan di wilayah	7.0
2.	Meningkatnya produktivitas narapidana dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3.	Terwujudnya mantan Narapidana/anak yang taat Hukum	Menurunnya persentase residivis di Wilayah	1%
4.	Terwujudnya pemenuhan Hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah	55%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah	752.790.000
Jumlah		**752.790.000**

DIVISI PEMASYARAKATAN

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan. Indikator pengukur dalam penilaian kepuasan layanan Pemasyaraktan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, adalah tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan Pemasyarakatan pada Wilayah Sulwesi Barat.

Metode yang digunakan pada survey ini adalah metode Snowball. Survey ini dibagikan pada penerima layanan Pemasyarakatan pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Waktu pelaksanaan dilaskanan selama periode tahun 2020.

Tabel 3.8

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan	7	9.4	134.28

Berdasarkan survey yang dilaksanakan diperoleh skor **9.4** terhadap kepuasan masyarakat penerima layanan Pemasyarakatan lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{94.8}}{\mathbf{90}} \text{ X } 100\% = \mathbf{134.28}$$

Tabel 3.9

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan	9	7	9.4	9.4	105.33	134.28

Analisis :

Target capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan Tahun 2020 terdapat penurunan, yang mana pada tahun 2019 indeks yang menjadi target adalah 9.0, sedangkan pada tahun 2020 adalah 7.0.

Namun berdasarkan hasil survey kepuasan penerima layanan Pemasyarakatan yang dilaksanakan tersebut, dapat memberi gambaran bahwa capaian indeks layanan yang diberikan oleh petugas Pemasyarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memiliki hasil yang sama yaitu **9.4**. Hal ini terbukti dimana hasil survey pada tahun 2020 dan tahun 2019 memiliki skor indeks yang sama yaitu 9.4

Pencapaian ini tidak lepas dari meningkatnya intensitas sosialisasi dan internalisasi yang dilaksanakan oleh jajaran Pimpinan dalam hal pemberian layanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga pihak keluarga WBP dan Masyarakat sekitar LAPAS/RUTAN. Tidak lepas juga kepada Petugas Pemasyarakatan pemberi Layanan yang mengutamakan keramahan dalam memberikan layanan dan penjelasan kepada penerima Layanan.

Hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan ini merupakan dampak dari Komitmen dan integritas yang ditanamkan kepada seluruh petugas Pemasyarakatan jajajran Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai

pekerjaan di wilayah

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang bertujuan untuk melakukan optmalisasi pembinaan Kemandirian Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan menuju manusia berdayaguna dan mandiri dalam lingkungan masyarakat umum.

Indikator pengukur keberhasilan Sasaran Program ini adalah Persentase Narapidana/anak dan Klien Pemasyarakatan adalah jumlah Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang telah bebas dan berdaya guna dalam lingkungan masyarakat, serta memiliki pekerjaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah menjalani masa Pidana/Bebas.

Tabel 3.10

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%	35%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dari hasil laporan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan pengawasan dan pembinaan Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang telah bebas, hasil persentase yang diperoleh adalah **35%.** Hal ini merupakan hasil dari pencapaian program kinerja utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yaitu pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan pada setiap Lapas/Rutan.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{35}}{} \text{ X } 100\% = \mathbf{101.97\%}$$

35

Tabel 3.11

Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	15.2	35	15.5	35	101.97%	101.%

Analisa :

Berdasarkan hasil perbandingan penilaian capaian indikator kinerja persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah tahun 2019 dan 2020, diperoleh hasil peningkatan capaian pada tahun 2020, namun peningkatan capaian tersebut di karenakan adanya peningkatan target yang harus dicapai.

Capaian Perjanjian Kinerja pada Output ini juga telah melampaui capaian tahun 2019 sebesar 2125.80% dikarenakan adanya jumlah peningkatan Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas dibandingkan pada Tahun 2019

Menurunnya Persentase Residivis

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang bertujuan untuk melakukan optmalisasi pembinaan Kemandirian

Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan untuk meningkatkan Ketaatan Hukum Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.

Indikator pengukur sasaran Program ini adalah Menurunnya Persentase Residivis pada Lapas dan Rutan Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dengan kata lain target capaian ini adalah berkurangnya jumlah Mantan Narapidana yang kembali ke dalam Lapas dan Rutan sebagai terpidana dengan kasus yang sama.

Tabel 3.12

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan dari Laporan Unit Pelaksana Teknis dan data Sistem Database Pemasyarakatan, hasil persentase yang diperoleh adalah **1%**

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.13

Perbandingan capaian Menurunnya Persentase Residivis Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Menurunnya Persentase Residivis	9.8	1	9.8	1	100%	100%

Analisa :

Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh dari target capaian Menurunnya Persentase Residivis, pada tahun 2020 tedapat penurunan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menurunnya jumlah residivis sebesar 1% atau penilaian capaian 100%.

Jika dibandingkan pada tahun 2019, terdapat peningkatan Kinerja yang cukup signifikan pada indikator Kinerja ini. Hal tersebut terbukti melalui data penurunan Residivis pada Tahun 2019 terdapat penekanan terhadap jumlah data residivis yaitu dari 9.8% pada tahun 2019 menjadi 1% pada tahun 2020

Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dimana bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak yang berhadapan dengan Hukum dengan melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Tabel 3.14

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah	55%	78%	141.81%

Indikator pengukuran Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah adalah jumlah anak didik pada LPKA di Sulawesi Barat yang meneruskan pendidikannya, sesuai dengan jenjang pendidikan terakhirnya. Dari 14 orang anak didik pada LPKA, 11 orang melanjutkan pendidikannya, sedangkan 3 orang anak lainnya masih dalam proses penahanan Kepolisian.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{78}}{\mathbf{55}} \times 100\% = \mathbf{141.81\%}$$

Tabel 3.15

Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah	55	55	55	78	100	100

Analisis :

Pada Tahun 2019 target Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah adalah 6 anak dari total 11 anak binaan pada LPKA, sedangkan pada Tahun 2020 total anak yang melanjutkan pendidikan adalah 11 orang dari 14 anak binaan pada LPKA. Terdapat peningkatan kinerja pada indikator kinerja Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah di tahun 2020, yang merupakan hasil dari komitmen bersama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemasyarakata di Sulawesi Barat.

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I
Unit Eselon II : Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	7.3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	2%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.463.237.000
Jumlah		**1.463.237.000**

DIVISI IMIGRASI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Teknis Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Imigrasi.

Tabel 3.16

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	7	9.5	135.71%

Indikator pengukur dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat penerima layanan Keimigrasian lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang dilaksanakan pada periode tahun 2020.

Dari hasil pengukuran tingkat kepuasan masyrakat tersebut diperoleh nilai survey **9.5**

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{9.5}}{\mathbf{7}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{135.71\%}$$

Tabel 3.17

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	7	8.9	9.5	121.92%	135.71%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan besaran persentase mencapai 35.71%. Target indeks kepuasan masyarakat yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah 7, sedangkan berdasarkan dari hasil survey yang dilaksanakan diperoleh skor/nilai **9.5**.

Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Imigrasi. Indikator pengukur dalam Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, adalah menurunnya jumlah tindakan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat.

Tabel 3.18

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	2%	2%	100%

Berdasarkan hasil Laporan yang di peroleh dari Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, jumlah persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian adalah sebesar 2% atau telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hak ini dikarenakan oleh Pelaksanaan LHi oleh unit pelaksana teknis dalam rangka meminimalisir pelanggaran keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direktorat Jenderal Imigrasi

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.18

Perbandingan capaian persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian	2	2	2	2	100%	100%

Analisis :

Pencapaian indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian pada tahun 2020 mengikuti trend seperti pada tahunsebelumnya, yaitu menekan penutrunan pelanggaran Keimigrasian sampai dengan 2%. Hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Intelejen pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang telah memenuhi seluruh prosedur dari Ditjen Imigrasi.

Jika dilihat pada pencapaian Kinerja Tahun 2019, persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian pada tahun 2019 adalah sebesra 2%, hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menurunkan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat.

Tabel : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Unit Eselon I : 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I
2. Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I
3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I
4. Ditjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM R.I

Unit Eselon II : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tahun : 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	80%
2	Terselenggaranya pelayanan Kekeayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	10 Jumlah Permohonan

	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2 Lokus
3	Terfasilitasinya rancangan produk Hukum didaerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	23 Raperda
4	Terselenggaranya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang
5	Terwujudnya penghormatan, perlindunga dan pemenuhan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah Daerah
		Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Sulawesi Barat	3 Rekomendasi
6	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	48 Orang
		Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Kantor Wilayah

		Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah
		. Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kantor Wilayah
		. Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
7	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
8	Meningkatnya jumlaj PNBP AHU di wilayah	Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah	5%
9	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	1.984.000.000
2	Penyelenggaraan Kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	452.365.000

3	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan Hukum di wilayah	195.840.000
4	Penyelenggaraan Pemajuan HAM	224.790.000
5	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	856.324.000
6	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di wilayah	64.853.000
Jumlah		**3.778.172.000**

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Kegiatan ini adalah output yang mengukur kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam memberikan sosialisasi, diseminasi dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penggunaan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Divis Pelayanan Hukum dan HAM

Tabel 3.19

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	3	3	100%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah tingkat pemahamana

masyarakat terhadapa penyelenggaraan layanan Administrasi Jasa Hukum Umum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarga Negaraan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tersebut telah tercapai, dengan capaian sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.20

Perbandingan capaian Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	-	3	-	1	-	100%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Kinerja Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di tahun 2020 ini telah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pelaksanaan teknis sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh Kntor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah memenuhi petunjuk dari Unit Eselon I.

Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan

Kegiatan ini adalah output yang mengukur kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menyelesaikan permohonan layanan administrasi hukum umum. Pengukuran indikator layanan output ini adalah persentase jumlah laynan yang diselesaikan

Tabel 3.21

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	80%	100%	125%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan.

Dari hasil pengukuran pencapaian Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tersebut telah tercapai, dengan capaian sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{80}} \times 100\% = \mathbf{125\%}$$

Tabel 3.21

Perbandingan capaian Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	-	80%	-	100%	-	125%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Kinerja Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan di tahun 2020 ini telah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pelaksanaan teknis penerimaan layanan AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mampu diselesaikan dengan persentase 100%.

Tidak terdapat data pembanding pada tahu 2019, dikarenankan pengukuran indikator kinerja utama ini baru dilaksanakan di tahun 2020. Namun, hasil capaian di tahun 2020, selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam

pengambilan data ditahun-tahun berikutnya.

Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian permohonan pendaftaran layanan KI yang diterima dan dicatat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tabel 3.22

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	10 permohonan	26 permohonan	260%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima dan ditindak lanjuti di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dengan adanya MoU dengan Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi sehingga pemerintah daerah ikut mendorong masyarakatnya untuk melakukan pendaftaran KI dan kesadaran dari masyarakat Sulawesi Barat tentang pentingnya Pendaftaram KI sudah mulai terbangun berkat Kegiatan Promosi dan Diseminasi yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Sulbar

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima dan ditindak lanjuti di Kantor Wilayah Kemenyterian Hukum dan HAM,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{26}{10} \times 100\% = \mathbf{260\%}$$

Tabel 3.23

Perbandingan capaian Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	10	10	28	26	280%	260%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima dan ditindak lanjuti di Kantor Wilayah Sulawesi Barat pada Tahun 2020 melebihi dari taget dan pencapaian ini mengikuti tren seperti pada Tahun 2019, pada tahun 2019 dan Tahun 2020 Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima dan ditindak lanjuti pada Kntor Wilayah Sulawesi Barat adalah melebihi dari 100%.

Selama Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menerima 22 permohonan Hak Cipta dan Pendaftaran Merek sebanya 4 merek. Dari total 26 pendafataran Kekayaan Intelektual tersebut kesemuanya telah diterima dan diproses oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Output ini adalah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk memperkenalakna Kekayaan Intelektual dan menambah wawasan masyarakat Sulawesi Barat tentang potensi dan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tabel 3.24

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	30 Stakeholder	30 Stakeholder	100%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan, sosialisasi, diseminasi dan promsi Kekayaa Intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{30}}{\mathbf{30}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.25

Perbandingan capaian Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	30	30	30	30	100%	100%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada Tahun 2020 telah memenuhi taget yang ditetapkan dan pencapaian ini mengikuti tren seperti pada Tahun 2019, pada tahun 2019 dan Tahun 2020 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 30 stakeholder, dan tercapai sesuai dengan target.

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Output ini adalah pelaksanaan pencengahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk menekan adanya pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah Sulawesi Barat

Tabel 3.26

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2 Lokus	4 Lkus	200%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan, sosialisasi, diseminasi dan promsi Kekayaa Intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{2}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{400\%}$$

Tabel 3.27

Perbandingan capaian Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	1	2	2	4	200%	200%

Analisis :

Setelah dilaksanakan Koordinasi penegak hukum maka diperoleh data bahwa tidak ada laporan pelanggaran KI sehingga anggaran untuk penindakan di revisi menjadi pencegahan pelanggaran KI yg dilaksanakan di empat Kabupaten di Sulawesi Barat yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran KI.

Pencapaian Perjanjian Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada Tahun 2020 melebihi taget yang ditetapkan dan pencapaian ini mengikuti tren seperti pada Tahun 2019, pada tahun 2019 dan Tahun 2020 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 2 lokus dan 4 lokus stakeholder, dan telah tercapai melebihi dari target yaitu 1 lokus dan 2 lokus.

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi

Output ini adalah fasilitasi Rancangan Perturan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 3.26

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	23 Raperda	29 Raperda	126.08%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah rancangan peraturan daerah yangb terfasilitasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{29}}{\mathbf{23}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{126.08\%}$$

Tabel 3.27

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	24	23	30	29	125%	126.08%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada Tahun 2020 melebihi taget yang ditetapkan dan pencapaian ini mengikuti tren seperti pada Tahun 2019, pada tahun 2019 dan Tahun 2020 Jumlah pelaksanaan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 24 Raperda dan 23 Raperda, dan telah tercapai melebihi dari target yaitu 30 Raperda dan 29 Raperda.

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

Output ini adalah Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.28

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 orang	13 orang	108.3%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan, adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{13}}{\mathbf{12}} \times 100\% = \mathbf{108.3\%}$$

Tabel 3.29

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	30	12	30	13	100%	108.3 %

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian pembinaan perancang peraturan perundang-undangan pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 terdapat penurunan penetapan target yaitu menjadi 13 orang perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM

Output ini adalah Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM. Kegiatan tersebut dipantau dan dibina langsung oleh dipantau oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.30

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	150%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan program aksi HAM di wilayah Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran pencapaian Jumlah Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{6}}{\mathbf{4}} \times 100\% = \mathbf{150\%}$$

Tabel 3.31

Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM	2	4	6	6	300%	150%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM di wilayah Sulawesi Barat secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 6 Instansi Pemerintah Daerah.

Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Sulawesi Barat

Output ini adalah Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.32

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{6}}{\mathbf{4}} \text{ X } 100\% = \mathbf{150\%}$$

Tabel 3.31

Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	3	3	3	3	100%	100%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 3 Rekomendasi.

Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi

Output ini adalah Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.32

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	48 orang	152 orang	316.66%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{152}}{\mathbf{48}} \times 100\% = \mathbf{316.66\%}$$

Tabel 3.31

Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	85	48	200	152	235.29%	316.66%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 200 kegiatan bantuan pada tahun 2019 dan 152 kegiatan bantuan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pencapaian kinerja disbanding tahun 2019, dikarenakan alokasi kurangnya anggaran.

Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin

Output ini adalah Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.34

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 kegiatan	40 kegiatan	571.42%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum non Litigasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{40}}{\mathbf{7}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{571.42\%}$$

Tabel 3.35

Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	24	7	49	40	204.17%	571.42%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin pada tahun 2019, dimana melebihi dari target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 49 kegiatan bantuan pada tahun 2019 dan 40 kegiatan bantuan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pencapaian kinerja disbanding tahun 2019, dikarenakan alokasi kurangnya anggaran

Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah

Output ini adalah pelaksanaan pengawasan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sepanjang tahun 2020.

Tabel 3.36

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah pelaksanaaan pengawsan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.37

Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1	1	1	1	100%	100%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan

Bantuan Hukum di Wilayah pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 1 Kantor Wilayah pada tahun 2019 dan 1 Kantor Wilayah pada tahun 2020.

Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah

Output ini adalah pelaksanaan Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sepanjang tahun 2020.

Tabel 3.38

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Pencapaian Indikator pengukur Kinerja ini adalah pelaksanaaan Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dari hasil pengukuran Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah,adalah sebagai berikut.

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.39

Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1	1	1	1	100%	100%

Analisis :

Pencapaian Perjanjian Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah di Wilayah Sulaeesi Barat secara umum tercapai dengan baik. Hal ini, ini selaras dengan pencapaian Terselenggaranya Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah pada tahun 2019, dimana memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian yang dicapai pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 1 Kantor Wilayah pada tahun 2019 dan 1 Kantor Wilayah pada tahun 2020

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi perencanaan dan perancangan produk Hukum daerah agar menghasilkan produk Hukum yang berkualitas yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.40

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	300%

Pencapaian Indikator pengukur Perjanjian Kinerja ini adalah Jumlah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{1}} \times 100\% = \mathbf{300\%}$$

Tabel 3.41

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1	1	2	3	200%	300%

Analisis :

Selama tahun 2020 kegiatan penyuluhan penyelenggaraan perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah tercapai dan telah melabihi dari Target Perjanjian Kinerja dengan bobot capaian 3 Daerah. Daerah yang melaksanakn perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah adal Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar.

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian Perjanjian Kinerja ini memiliki persentase capaian dan Bobot capaian yang melebihi jika disbanding dengan di Tahun sebelumnya, yaitu dengan kelebihan bobot 1 daerah dengan persentase Capaian Kinerja 300%.

Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran Databease Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 3.42

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Pencapaian Indikator pengukur Perjanjian Kinerja ini adalah Jumlah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.43

Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	**Target**		**Relisasi**		**Capaian**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN	1	1	2	1	200%	100%

Analisis :

Selama tahun 2020 kegiatan penyelenggaraan layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN memiliki capaian yang optimal, hal ini karena pencapaian Perjanjian kinerja tahun 2020 memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah yang melakukan pemutakhiran data melalui sitem JDIHN adalah Prov. Sulawesi Barat.

Perbandingan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2019 Pemerintah daerah yang berpartisipasi pemutakhiran data JDIHN, Kab. Mamuju dan Kab. Majene, sedangkan pada tahun 2020 hanya Prov. Sulawesi Barat.

Persentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Kajian yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, untuk dijadikan bahan penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tabel 3.44

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60%	100%

Pencapaian Indikator pengukur Perjanjian Kinerja ini adalah Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{20}}{\mathbf{20}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.45

Persentase Rekomendase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20	20	20	20	100 %	100 %

Analisis :

Selama tahun 2020 pencapaian dari Perjanjian Kinerja ini telah memenuhi target. Hasil penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah di kirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dan persentase rekomendasi kajiannya adalah 60% atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun output capain tersebut adalah Tersusunnya laporan sebagai rekomendasi hasil Kajian Hukum dan HAM tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM dan Implementasi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University:* Study tentang Pengelolaan Pengetahuan di Tingkat Wilayah

Dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian Perjanjian Kinerja ini terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, dengan bobot Rekomendasi Kajian dari sebesar 20% menjadi 60% dan dengan Persentase Capaian yang sama yaitu 100%.

.

Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait hasil pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tabel 3.46

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Hasil Penelitian/pengkajian Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

Pencapaian Indikator Jumlah buku hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \text{ X } 100\% \quad = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3.47

Hasil Penelitian/pengkajian Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasi di Wilayah	1	1	1	1	100%	100%

Analisis :

Selama tahun 2020 pencapaian dari Perjanjian Kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini adalah 1 buku yang disosialisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dibandingkan dengan tahun 2019, di tahun 2020 juga melaksanakan Sosialisasi 1 buku hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tabel 3.48

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah	5%	16.26%	325.2%

Pencapaian Indikator ini adalah Persentase peningkatan PNBP AHU di

wilayah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{16.26}}{\mathbf{5}} \times 100\% = \mathbf{325.2\%}$$

Tabel 3.49

Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah	-	5%	-	16.26%	-	325.2 %

Analisis :

Selama tahun 2020 pencapaian dari Perjanjian Kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Total PNBP Program Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2020 Bulan Januari – Oktober 2020 senilai Rp. 251.450.000,-. Dengan Target PNBP Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat senilai Rp. 309.172.500,-. berdasarkan total PNBP AHU Kantor Wilayah Per Oktober 2020 maka diperoleh presentase senilai 81.3 %. Jadi target presentase capaian peningkatan PNBP AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah Presentase Capaian Kinerja dibagi dengan Capaian Target (5 %) dikalikan dengan 100 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

(81,3 % : 5 %) x 100 %= 16,26 %

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD di wilayah Sulawesi Barat

Tabel 3.50

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indiaktor	Target	Realisasi	Persentase
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	100%	125%

Pencapaian Indikator ini adalah Persentase pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris yang ditidaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Penilaian Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{\mathbf{100}}{\mathbf{80}} \times 100\% = \mathbf{125\%}$$

Tabel 3.51

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Tahun 2020 dan 2019

Indikator Kinerja Program	Target		Relisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	-	80%	-	100 %	-	125%

Analisis :

Selama tahun 2020 pencapaian dari Perjanjian Kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Selama Tahun 2020 terdapat 1 laporan yaitu Laporan dugaan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh notaris terhadap stafnya. Setelah mendengar keterangan dari pelapor. Majelis Menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan atas dugaan pencemaran nama baik tidak terkait dengan jabatannya sebagai notaris sehingga ini merupakan delik bias dan dinyatakan selesai.

B. Realisasi dan Kinerja Anggaran

Tabel 3.52

Tabel Penyerapan Anggaran Per Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat periode Tahun Anggaran 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Dukungan Manajemen Kantor Wilayah	14.149.206.000	14.054.423.212	99.33
2	Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	752.790.000	717.978.637	95.38
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.463.237.00	866.971.000	59.25
4	Program Adminsitrasi hukum Umum	1.984.000.000	1.380.377.394	69.58
5	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayan Intelektual	452.365.000	444.377.966	98.23
6	Program Pembentukan Hukum	195.840.000	194.097.306	99.11
7	Program Pemajuan HAM	224.790.000	224.067.000	99.68

8	Program Pembinaan Hukum Nasional	892.294.000	870.609.953	97.57
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	64.853.000	64.793.000	99.91
JUMLAH		20.179.375.000	18.817.695.732	93.25

Tabel 3.53
Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART per Program Periode Tahun Anggaran 2020

PROGRAM	CAPAIAN
Dukungan Manajemen	98.31
Pemasyarakatan	98.71
Keimigrasian	89.80
AHU	91.72
KI	98.12
PP	98.95
BPHN	96.09

HAM	97.97
Balitbang KUMHAM	98.09

Tabel 3.54
Kinerja Anggaran berdasarkan IKPA per Program
Periode Tahun Anggaran 2020

PROGRAM	CAPAIAN
Dukungan Manajemen	95.75
Pemasyarakatan	95.66
Keimigrasian	88.32
AHU	89.03
KI	94.97
PP	92.89
BPHN	93.24
HAM	95.66
Balitbang KUMHAM	95.66

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang dicapai pada tahun 2020 secara umum terpenuhi sesuai yang direncanakan.

Evaluasi kinerja program kegiatan Kantor Wilayah dengan cara melakukan perbandingan capaian kinerja program dan kegiatan selama tahun 2020 dengan rincian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Hal ini ditentukan keberhasilan dari beberapa fakta sebagai berikut :

- Tantangan
- Masalah / Kendala
- Peluang
- Keberhasilan / Kegagalan

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam peningkatan kinerja dan pencapaian program serta target pada Perjanjian Kinerja, antara lain :

- Masih terbatasnya Jumlah Pegawai/SDM pada Kantor Wilayah maupun pada Unit Pelaksana Teknis, belum memiliki staf/pegawai yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Selian itu terdapat beberapa staff yang melakukan rangkap tugas dikarenakan kurangnya SDM.
- Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya volume layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
- Adanya refocusing/optimalisasi Anggaran guna penanganan pencegahan penyebaran virus Covid-19

- Pembatasan Maksimum pencairan (MP) pada pagu PNBP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Program pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dan Program administrasi hukum umum) guna optimalisasi dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19

2. Masalah / Kendala

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdapat beberapa masalah / kendala yang dihadapi, disamping masalah / kendala internal maupun eksternal sesuai dengan kondisi daerah. Masalah / kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terutama di dalam pencapaian program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang ada pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat dilihat dari dua sisi yakni dari segi kuantitas dimana jumlah pegawai atau persyaratan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih sangat kurang sehingga pengisian jabatan dan alokasi pegawai tidak seimbang terhadap beban kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat termasuk alokasi pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang mengalami kekurangan personil

Di pihak lain dilihat dari segi kualitas aparatur pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih dibutuhkan beberapa tenaga yang memiliki kualitas , disamping itu sesuai dengan kondisi unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat dibentuk jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang sampai saat ini belum terealisasi secara menyeluruh Jabatan Fungsional pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

b. Masalah Sarana dan Prasarana

Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan yang diusulkan Lewat RKA-KL melalui tingkat Kanwil dengan Biro Perencanaan Pusat belum terjadi Harmonisasi, mengingat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar merupakan masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat seperti kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung, seperti; Pemb. Gedung Bapas Mamuju dalam membantu pelaksanaan tugas Bapas klas II Polewali yang terkendala oleh Wilayah kerja yang cukup luas.

c. Dasar Hukum Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Masalah/kendala yang dihadapi unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dalam mendukung otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab khususnya di bidang pembangunan hukum dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang masih membutuhkan penguatan kelembagaan yang lebih tepat atas institusi Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Provinsi.

d. Koordinasi dan kerjasama Pemda dan Instansi Terkait

Masalah /kendala khususnya masalah koordinasi merupakan masalah yang perlu penyelesaian terutama masih adanya pandangan yang bersifat egosentrik dari instansi-instansi terkait termasuk pemerintah daerah, sejak pelaksanaan otonomi daerah terdapat kecenderungan dalam pemerintahan daerah terlepas dari campur tangan instansi-instansi penegak hukum lainya sehingga pelaksanaan program pemerintahan di daerah kadang kala tidak melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, namun diperlukan adanya kesepakatan (MOU) dalam bentuk piagam kerja sama yang lebih tepat antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian yang ada, Lembaga Penegak Hukum lainnya baik di pusat maupun di daerah yang ada sehingga terjadi koordinasi dan kerja sama yang optimal di daerah.

e. Menurunnya kinerja diakibatkan adanya Pandemi Covid-19

Dikarenakan, adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hamper seluruh sektor, dan guna meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19, maka ditetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dikarenakan pengetatan kebijakan PSBB pada periode semester I, maka KInerja Kantor Wilayahpun berpengaruh. Hamper seluruh target kinerja yg seharusnya dilaksanakan pada periode tersebut harus ditunda.

3. Peluang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdapat beberapa peluang yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan sasaran yang akan dicapai yakni :

a. Melakukan Koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi terkait dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik dibidang pemasyarakatan, keimigrasian, pelayanan di bidang hukum dan HAM serta pelaksanaan tugas di bidang administratif dan fasilitasif sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan berkesinambungan
b. Masyarakat Sulawesi Barat dalam pembangunan hukum dan perlindungan HAM telah berpartisipasi aktif dan pasif terutama lembaga-lembaga sosial keagamaan sehingga Kantor Wilayah dalam pembangunan hukum dapat berjalan lancar, tertib dan aman.
c. Dengan adanya kebijakan umum dan rencana strategis dari pusat telah memberikan peluang bagi daerah untuk melaksanakan oprasional pembangunan hukum dan perlindungan HAM di Wilayah.
d. Adanya komitmen yang kuat dan pengabdian yang tinggi dari seluruh aparatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas pokok dan sesuai dengan fungsi masing-masing.
e. Wilayah Sulawesi Barat dalam lingkungan strategi baik budaya, sosial, ekonomi dan lingkungan strategis lainnya telah mencapai hasil yang

cukup maksimal.

f. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, Kantor Wilayah Sulawesi Barat berpeluang melakukan inovasi layanan publik berbasis teknologi Informasi (IT)

g. Selain itu, selama masa pandemi Covid-19, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga dapat melakukan efisiensi poengguna Anggaran dan Optimalisasi capaian Kinerja menggunakan Anggaran yang ada.

4. Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan fakta dan kondisi serta situasi Wilayah Sulawesi Barat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah telah mencapai hasil dan sasaran pembangunan hukum dan perlindungan HAM secara baik, namun demikian dengan adanya kendala / masalah yang dihadapi maka pelaksanaan belum mencapai target yang optimal.

a. Keberhasilan

- Secara umum Taget Kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat sudah tercapai dengan baik.

  Pada tahun 2020 terdapat 14 Sasaran Strategis denga 26 Indikator Kinerja sebagai penunjang tercapainya sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran Strategis tersebut merupakan turunan dari Sasaran Strategis Unit Eselon I dan dilaksanakn oleh 4 Divisi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

  Divisi Administras memiliki 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja yang menjadi target Kinerja pada Tahun 2020. Selama tahun 2020, 2 indikator Kinerja Divisi Adminsitrasi tercapai dan 1 indikator tidak tercapai..

  Divisi Pemasyarakatan memiliki 4 Sasaran Strategis dengan 4Indikator Kinerja. Pada pelaksanaanya, selama tahun 2020 semua indikator Kinerja Divisi Pemasyarakatan tercapai.

  Divisi Imigrasi Memiliki 2 Sasaran Strategis dengan 2 Inidikator Kinerja. Pada pelaksanaanya, selama tahun 2020 semua indikator

Kinerja Divisi Keimigrasian tercapai.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 7 Sasaran Strategis dengan 17 Indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selama tahun 2020 adalah memenuhi target 17 indikator Kinerja Program

b. Kegagalan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah belum terdapat tingkat kegagalan yang serius karena umumnya pencapain sasaran dan kegiatan dapat diselesaikan kegagalan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1). Indikator Kinerja nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tahun 2020 tidak tercapai. Hal ini disebabkan menurunnya kualitas layanan yang disebabkan oleh adanya rehabilitasi gedung kantor, lahan parkir dan pagar. Selain itu menurunnya Nilai Reformasi Birokrasi juga disebabkan oleh adanya penerapan PSBB secara ketat pada periode semester I tahun 2020 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan kerja dari kantor dan kegiatan layanan masyarakat secara umum.

Namun di sisi lain, hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Sulawesi Barat dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM. Terbukti, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berhasil sampai di tahapan penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) .

Kerjasama dan peran, serta sinkronisasi kerja seluruh stakeholder jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik merupakan salah satu pendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga menciptakan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efesien.Selanjutnya, dalam perwujudan dalam menjadikan masyarakat Sulawesi Barat menjadi provinsi yang taat hukum perlu

adanya kerjasama yang baik antar seluruh institusi penegak hukum dan pemerintah yang ada di Provinsi/Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat serta dukungan dari seluruh Masyarakat. Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Sulawesi Barat menjadi Provinsi maju yang setara dengan Provinsi yang berkembang di Indonesia.

Demikian kami sampaikan laporan KInerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan kami harapkan saran dan koreksi, semoga ditahun mendatang dapat lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan tanggung jawab yang pemerintah dan Masyarakat yang diamanatkan kepada kita, Amin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat kami sampaikan, selanjutnya semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kritikan bagi kami aparatur di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Mamuju, 18 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah,

H. M. Anwar N.
NIP. 19630702 199003 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Farida, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kagagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Administrasi
Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002	Mutia Farida, S.H., M.H. NIP. 19670711 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 13.467.043.000,-

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
NIP. 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

Mutia Fanda, S.H., M.H.
NIP. 19670711 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Elly Yuzar, M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pemasyarakatan
Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002	Drs. Elly Yuzar, M.H. NIP. 19650707 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan diwilayah	7,0
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantanNarapidana yang diterimamasyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3.	Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taathukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%
4.	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	55%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 752.790.000,-
	JUMLAH	**Rp. 752.790.000,-**

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
NIP. 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Drs. Elly Yuzar, M.H.
NIP. 19650707 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlanda tangan dibawah ini :

Nama : Wishnu Daru Fajar, S.H.
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Harun Sullanto, Bc.IP., S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Keimigrasian
Drs. Harun Sullanto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002	Wishnu Daru Fajar, S.H. NIP. 19641004 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	2%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	**Rp. 1.463.237.000,-**

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
NIP. 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian

Wishnu Daru Fajar, S.H.
NIP. 19641004 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PELEYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Sri Lastami, S.T., M.IPL
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Pihak Pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002	Drs. Sri Lastami, S.T., M.IPL. NIP. 19651231 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	80%
2	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	10 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus
3.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	23 Raperda
4.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 orang
5.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanankan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah.	3 Rekomendasi
6.	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlahorang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	48 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di	1 Kantor Wilayah

		wilayah	
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
7.	Terwujudnyaperumusankebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasisriset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.984.000.000,-
2.	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 452.365.000,-
3.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp. 195.840.000,-
4.	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 224.790.000,-
5.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 856.324.000,-
6.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 64.853.000,-
	Jumlah	Rp. 3.778.172.000,-

Mamuju, 09 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.
NIP. 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Drs. Sri Lastami, S.T., M.IPL
NIP. 19651231 199103 2 001